

PENDAHULUAN

Pendekatan *multi-stakeholder partnership* (MSP) semakin dipandang relevan dalam administrasi publik karena menekankan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan aktor non-pemerintah dalam proses implementasi kebijakan publik. Dalam konteks penanggulangan stunting, pendekatan ini menjadi penting karena stunting merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi, pendidikan, sanitasi, ketahanan pangan, serta akses pelayanan dasar masyarakat. Kompleksitas tersebut menyebabkan penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral maupun hanya bertumpu pada satu institusi, melainkan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan (Renzaho et al., 2017; Shekar et al., 2017).

Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan penanggulangan stunting melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan dan fungsi yang berbeda, seperti sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, pemerintah desa, serta organisasi masyarakat. Keterlibatan berbagai aktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan integrasi kebijakan antar organisasi pelaksana. Sejumlah studi internasional menunjukkan bahwa pendekatan *multi-stakeholder partnership* mampu memperkuat efektivitas implementasi kebijakan stunting melalui penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi intervensi, dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program (Rah et al., 2020; Shekar et al., 2017).

Merujuk pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial politik, serta disposisi pelaksana kebijakan. Ketidaksinambungan antar faktor tersebut berpotensi menghambat efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan, terutama pada kebijakan yang

melibatkan banyak aktor dan lintas sektor seperti penanggulangan stunting (Paikah et al., 2024).

Secara global, stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang serius. Berdasarkan laporan *Joint Child Malnutrition Estimates* yang diterbitkan oleh *World Health Organization, United Nations Children's Fund*, dan *World Bank*, jumlah balita yang mengalami stunting di dunia masih berada pada tingkat yang tinggi dan cenderung stagnan, yaitu lebih dari 150 juta anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya penurunan stunting secara global belum berjalan optimal dan masih menjadi tantangan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (WHO, UNICEF, & World Bank, 2024).

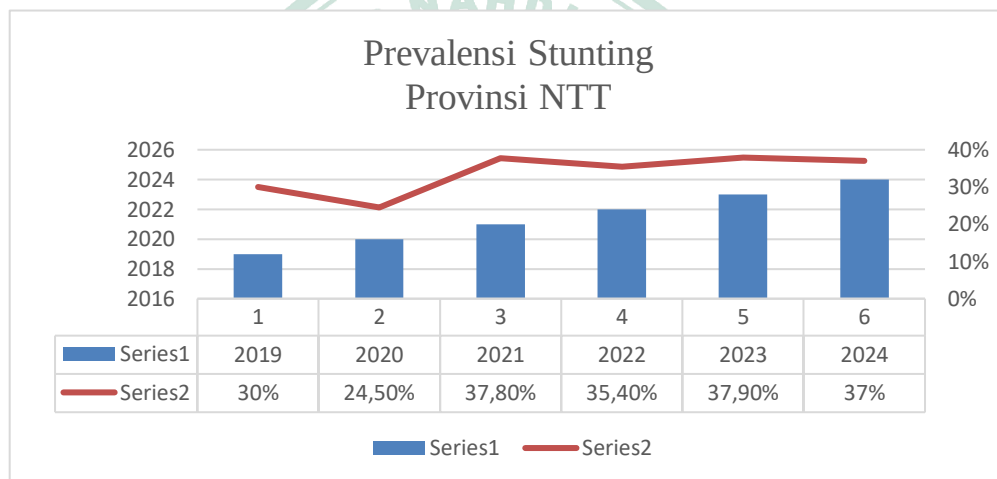
Di Indonesia, penurunan stunting menjadi prioritas utama pembangunan sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya intervensi terintegrasi melalui pendekatan lintas sektor dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam percepatan penurunan stunting. Meskipun prevalensi stunting nasional menunjukkan kecenderungan menurun, capaian antar daerah masih belum merata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dengan efektivitas implementasinya di tingkat daerah, yang dipengaruhi oleh kapasitas tata kelola kebijakan publik, koordinasi antar sektor, serta kemampuan kelembagaan daerah dalam menjalankan program penurunan stunting (Andrestian et al., 2025; Rah et al., 2020).

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2021 prevalensi stunting di NTT mencapai 37,8% dan pada tahun 2024 berada pada angka 37% (SSGI, 2024; IKPS, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa percepatan penurunan stunting di NTT belum berjalan optimal dan masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Tingginya angka stunting di NTT dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, keterbatasan akses sanitasi dan pelayanan kesehatan, kondisi geografis yang sulit dijangkau,

rendahnya literasi gizi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan penurunan stunting (Hadi, 2020; Siswati et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan dan *multi-stakeholder partnership* dalam penanggulangan stunting di Nusa Tenggara Timur melalui pendekatan *systematic literature review*. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana hubungan antara implementasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor memengaruhi efektivitas program penurunan stunting di daerah. Berikut data stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel 1. Data stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur



Sumber: Diolah oleh penulis dari data SSGI 2023 (Kementerian Kesehatan RI) dan IKPS 2023 (BPS)

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penanganan stunting di daerah tidak hanya terletak pada aspek teknis layanan kesehatan, tetapi juga pada pola implementasi kebijakan serta mekanisme koordinasi antar sektor. Afandi (2023) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di NTT masih cenderung bersifat *top-down* dan belum didukung oleh kemitraan lintas sektor yang kuat. Koordinasi antarinstansi pemerintah belum berjalan secara optimal, sementara keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat, tokoh adat, dan

komunitas lokal, masih bersifat formal dan belum terintegrasi secara substantif dalam struktur pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada peran pemerintah belum mampu menjawab kompleksitas persoalan stunting di tingkat lokal.

Oleh karena itu, penguatan pendekatan *multi-stakeholder partnership* menjadi penting untuk mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan aktor non-pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, terutama di daerah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks seperti NTT.

Rumusan Masalah Penelitian:

Tingginya prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kompleksitas persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjalankan program secara terintegrasi. Keterbatasan koordinasi lintas sektor, ketimpangan kapasitas antar pelaksana program, serta hambatan kemitraan di tingkat daerah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, pendekatan *multi-stakeholder partnership* menjadi penting untuk dikaji.

Dari Banyaknya jumlah anak yang stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) pemerintah berupaya menurunkan angka stunting Nasional 50% lebih kecil sesuai dengan tujuan 2 *Zerro Hunger*. Pemerintah membentuk GDPS di Nusa Tenggara Timur untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pencegahan stunting
2. Memperkuat peran pemerintah desa dalam mengkoordinasikan program kesehatan dan gizi
3. Mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dalam pemenuhan gizi keluarga
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penanganan stunting.

Gerakan Desa Peduli Stunting (GDPS) merupakan inisiatif berbasis desa yang berkembang sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Program ini tidak berdiri sebagai kebijakan nasional yang terpisah, melainkan merupakan bentuk implementasi dari kebijakan percepatan penurunan stunting yang diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dalam kerangka implementasi tersebut, sejak periode 2021–2022 pemerintah semakin menekankan penguatan peran desa melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di tingkat daerah serta optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendukung intervensi kesehatan dan gizi masyarakat.

Keberadaan TPPS ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak hanya bersifat sektoral, tetapi melibatkan pendekatan kolaboratif lintas aktor (*multi-stakeholder*), mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, hingga unsur masyarakat. Dalam konteks ini, GDPS diarahkan untuk berfungsi sebagai instrumen implementatif di tingkat desa yang memiliki beberapa tujuan utama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko stunting, memperkuat peran pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.

Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi GDPS masih menghadapi tantangan yang bersifat struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antar desa, yang berdampak langsung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring program (Siswati et al., 2022). Ketimpangan ini kemudian berkontribusi pada tidak meratanya pelaksanaan program di berbagai wilayah, sehingga efektivitas GDPS menjadi berbeda-beda antar desa (Hadi, 2020; Paikah et al., 2024). Selain itu, pemanfaatan dana desa untuk mendukung program penurunan stunting dan tujuan pembangunan desa berkelanjutan (SDGs Desa) juga masih belum optimal di sejumlah wilayah (Sriatmi et al., 2021).

Di sisi lain, aspek partisipasi masyarakat juga menjadi kendala penting. Meskipun GDPS secara konseptual menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pencegahan stunting, pada praktiknya keterlibatan masyarakat masih cenderung bersifat pasif dan terbatas pada penerimaan program, bukan pada keterlibatan aktif dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan (Sufri et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, ditegaskan bahwa keberhasilan GDPS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program kebijakan formal semata, tetapi sangat bergantung pada kapasitas implementor di tingkat desa serta kualitas partisipasi masyarakat. Keterbatasan dua aspek menyebabkan implementasi program belum berjalan secara optimal, baik dari sisi pemerataan pelaksanaan maupun keberlanjutan pelaksanaan kegiatan penanganan stunting seperti layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta perbaikan sanitasi di tingkat lokal.

Berdasarkan data tersebut, masih minim kajian yang secara khusus mengkaji bagaimana pendekatan *multi-stakeholder partnership* diterapkan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan pada aspek kesehatan dan gizi, sementara dimensi tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan publik masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan *multi-stakeholder partnership* dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui *Scopus-based Systematic Literature Review*, guna mengidentifikasi pola kolaborasi terhadap kebijakan publik di tingkat daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan:

RQ1: Bagaimana implementasi kebijakan penurunan stunting dalam *multi-stakeholder partnership*?

RQ2: Bagaimana koordinasi dan pembagian peran antar pemangku kepentingan?

RQ3: Apa hambatan dalam kemitraan *multi-stakeholder*?